

## DAMPAK PENURUNAN HAMBATAN DAN PENINGKATAN KEMUDAHAN PERDAGANGAN TERHADAP PRODUKSI, NERACA PERDAGANGAN PERTANIAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### *Impacts of Down-scaling Trade Restrictions and Improving Trade Facilitation on Agricultural Production and Trade Balance, and Welfare*

**Budiman F. Hutabarat**

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A. Yani No.70, Bogor 16161  
E-mail: budihutabarat@yahoo.com*

Naskah diterima: 8 Maret 2015

Naskah direvisi: 16 Maret 2015

Disetujui terbit: 28 April 2015

#### ABSTRACT

In tandem with the effort of WTO that insists its members to cut their tariff, standardization, and in general, the non-tariff measures/NTMs have been gaining its role in today's world agricultural and food trade. The objectives of this paper is to review information and data pertaining to NTM and trade facilitation imposed by Indonesia's partner countries and investigate their impact on agricultural production and welfare. Based on GTAP Data Base Version 8.1, the paper concludes that **Vegyfru** (*Vegetables, fruit, nuts*) and **Vegyoil** (*Vegetable oils and fats*) production tend to increase, but for those of **Oilseed**, **Othfoodpr** (*Food products nec*) and **Oth\_sectors** (**Other sectors**), some scenarios project to their increases and other scenarios show otherwise. In spite of that all scenarios results in positive increases in welfare of Indonesians and world's population between US\$ 16 to 1,734 million. For Indonesia, improvement in trade facilitation in all regions would give the most benefits, relative to import tariff reduction done by partner countries or export tax/subsidy reduction done by all regions, including Indonesia. The paper suggests that Indonesia should actively follow the policy dynamics that relate to NTMs and trade facilitation applied by the partner countries on agricultural products' tariff lines in terms of types, size, and its characteristics. By so doing, Indonesia would gain a deeper understanding on defensive and offensive trade and economic interests of each of its partner countries and its own.

**Keywords:** *tariff and non-tariff measures/NTMs, trade facilitation, trade balance, welfare*

#### ABSTRAK

Seiring dengan pemotongan tarif secara menyeluruh di seluruh dunia yang digalakkan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD), pembakuan, dan secara umum tindakan bukan-tarif/TBT atau *non-tariff measures/NTMs*, menjadi makin penting perannya dalam perdagangan pertanian dan pangan dunia saat ini. Tujuan makalah ini adalah mendapatkan informasi dan data tentang hambatan perdagangan bukan-tarif dan kemudahan perdagangan yang diterapkan negara-negara mitra dan dampaknya pada produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil analisis dengan menggunakan Basis Data GTAP Versi 8.1 menunjukkan bahwa produksi **Vegyfru** (*Vegetables, fruit, nuts*) dan (*Vegetable oils and fats*), dan untuk **Oilseed**, **Othfoodpr** (*Food products nec*) dan **Oth\_sectors** (**Other sectors**) beberapa skenario menunjukkan peningkatan, tetapi beberapa lainnya menunjukkan penurunan. Semua skenario yang dipertimbangkan memberi peningkatan kesejahteraan bagi Indonesia dan dunia, antara US\$ 16 sampai US\$ 1.734 juta dolar AS. Bagi Indonesia kebijakan peningkatan keefisienan perdagangan di seluruh dunia memberikan manfaat yang paling besar dibandingkan dengan kebijakan pemotongan tarif impor atau pemotongan tarif ekspor. Saran kebijakan yang dapat disampaikan antara lain Indonesia perlu secara aktif mengikuti perkembangan kebijakan yang menyangkut tindakan bukan tarif/TBT dari sisi jenis, besaran, dan sifatnya untuk setiap pos tarif komoditas pertanian yang lebih rinci yang dilakukan negara-negara mitra. Dengan demikian, pengetahuan yang mendalam tentang daya bertahan dan daya serang perdagangan suatu negara mitra dan Indonesia sendiri dapat diperoleh.

**Kata kunci:** *tindakan tarif dan bukan-tarif, kemudahan perdagangan, neraca perdagangan, kesejahteraan*

## PENDAHULUAN

Sebagaimana dilaporkan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) dalam *World Trade Report 2012* (WTO, 2012) gambaran kebijakan perdagangan telah berubah. Kebijakan tidak langsung semakin menggantikan kebijakan langsung, seperti tarif, untuk menghambat perdagangan bebas antar dua negara. Hasil analisis Bank Dunia atau World Bank yang mendasarkan laporan dan data pantauan OPD dari waspada perdagangan secepat atau *the global trade alert* menunjukkan bahwa jumlah tindakan bukan tarif (TBT), atau *non-tariff measures (NTM)*—termasuk kuota, persyaratan lisensi impor, dan aturan pengadaan pemerintah—meningkat dalam dua tahun pertama pasca-2008, dan dengan tajam meningkat pada 2011 (Cadot dan Malouche, 2012).

Di sisi lain, dalam beberapa dasawarsa terakhir ini sudah semakin lazim untuk memproduksi barang dalam beberapa tahap yang dilakukan di tempat terpisah secara geografis yang dihubungkan dengan perdagangan internasional. Pada saat yang sama, di antara para penentu kebijakan makin meningkat perhatian mereka untuk menjawab hambatan-hambatan perdagangan selain tarif, yakni TBT di atas. Namun, dengan tarif yang makin menurun sejak tahun 1940-an, campur tangan pemerintah untuk merintang impor dalam bentuk bukan-tarif telah makin meningkat juga, yang mencakup rintangan dalam bentuk jumlah, hambatan teknis perdagangan, *sanitary dan phytosanitary (SPS)*, dan tindakan berbasis harga. Penerapan SPS dan notifikasi hambatan teknis perdagangan (HTP) atau *technical barriers to trade (TB to Ts)* oleh anggota-anggota OPD makin meningkat sejak 1995 (Bacchetta dan Beverelli, 2012). Ray (1981) memberikan bukti empiris bahwa TBT telah digunakan untuk mengimbangi penurunan tarif yang secara internasional disepakati, dan Limao dan Tovar (2011) menunjukkan bahwa perjanjian persetujuan pengalihan ke tarif meningkatkan kemungkinan jumlah, ragam, dan kekangan TBT.

Dari kumpulan catatan pengaduan pihak bisnis, Deardorff (2012) mengamati bahwa volume ekspor industri berbasis sumber daya

alam, seperti pertanian dan pangan, pertambangan, dan tekstil lebih rentan terhadap TBT. Lebih jauh WTO (2012) dan Bradford (2005) menyatakan bahwa peningkatan aturan pada produk pangan dan pertanian mendorong penerapan TBT karena makin banyak negara mengikuti baku pangan *Codex Alimentarius*, sehingga perdagangan pertanian makin terpengaruh TBT dibanding produk bukan-pertanian dan memang OPD mengizinkannya di bawah persetujuan SPS dan HTP. Bahkan, anggota-anggota OPD menetapkan tindakan lebih ketat jika ada bukti ilmiah dari ancaman dan risiko dari hama dan penyakit tersebut. Namun demikian, gerakan perlindungan tampaknya makin menjadi-jadi karena fakta bahwa baku keamanan pangan, hewan, dan tanaman untuk sebagian besar produk pangan dan pertanian yang diperdagangkan secara internasional tidak ada.

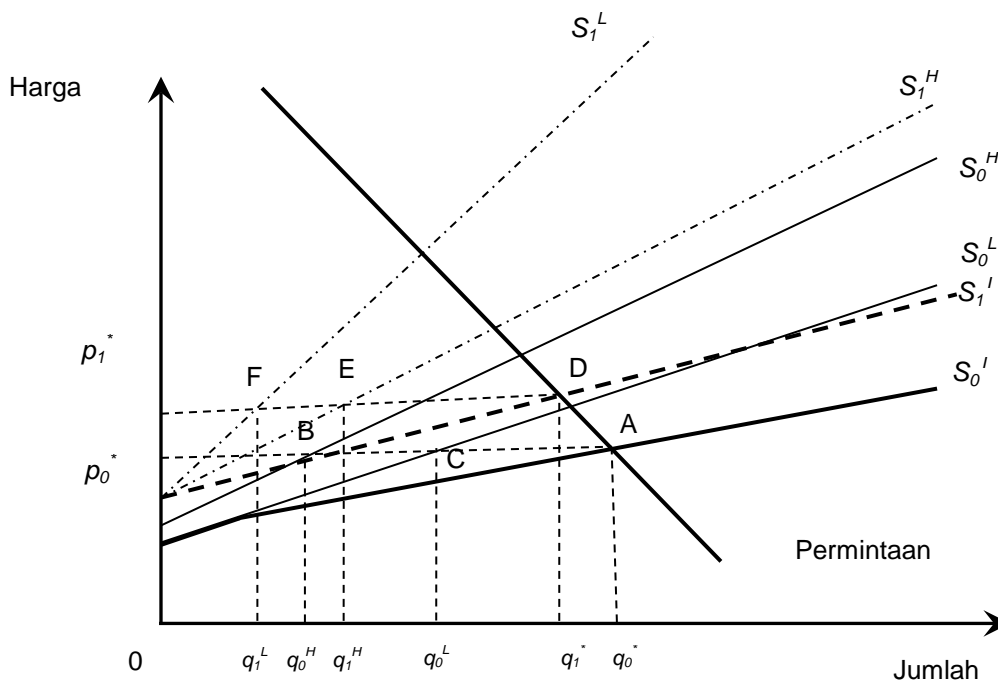
Dampak TBT yang diterapkan Indonesia terhadap produk pertanian mitra dagangnya banyak sekali diulas dalam literatur (antara lain Cadot dan Malouche, 2012; Devadoss, 2009; USAID, 2013). Demikian pula, informasi/literatur empiris tentang pengaruh TBT pada negara berkembang sangat terbatas (Disdier dan Fontagné, 2008), sementara untuk negara-negara maju sangat banyak (Deb, 2006). Padahal, menurut ITC (2013) hampir dua-pertiga (66%) negara pengekspor (negara berkembang) melaporkan bahwa negara tujuan ekspor mereka menerapkan persyaratan yang memberatkan ekspor mereka. Lima puluh lima persen hambatan-hambatan ini bersifat teknis yang sulit dan bahkan mungkin tidak terjangkau, apalagi bagi perusahaan kecil dan menengah yang ingin mengekspor. Makalah ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dan data tentang negara-negara tujuan ekspor utama produk pertanian Indonesia dan hambatan perdagangannya, khususnya tentang tindakan tarif dan bukan-tarif dan kemudahan perdagangan yang mereka terapkan. Lebih jauh, makalah ini juga menganalisis dampak tindakan-tindakan tersebut pada produksi, neraca perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat, agar Indonesia dapat berperan dan mengambil sikap dan posisinya serta memprogramkan pembangunan pertaniannya ke depan.

**METODE PENELITIAN**

**Kerangka Pemikiran**

Hambatan perdagangan, yang dalam makalah ini ditekankan pada tindakan bukan tarif/TBT atau *non-tariff measures/NTM*, dibatasi sebagai semua pengekangan arus perdagangan barang, jasa, dan investasi yang tidak berkaitan dengan harga dan/atau jumlah di tingkat provinsi, negara bagian, dan pusat (ECORYS, 2009). Oleh UNCTAD (2010), TBT dibatasi sebagai semua tindakan kebijakan, selain tarif cukai biasa, yang dapat berpengaruh ekonomi dalam perdagangan antarbangsa atas barang, mengubah jumlah yang diperdagangkan, atau harga-harga, atau kedua-duanya. Hambatan-hambatan ini mencakup tindakan di perbatasan (prosedur pabean dan lain-lain), dan juga tindakan di beranda perbatasan, mulai dari undang-undang, peraturan, persyaratan teknis, dan lain-lain. Karena TBT meliputi tindakan khusus yang bercakupan luas, pengaruhnya tidak mudah diukur dan tidak terbuka (Cadot *et al.*, 2012). Berbeda dari tarif, perhitungan TBT berbelit-belit, tidak mudah dimodelkan, dan informasi tentang TBT ini sulit diperoleh (Fugazza dan Maur, 2008; Fugazza, 2013).

Gambar 1 mengilustrasikan dampak tidak setangkup suatu TBT pada arus perdagangan bilateral dengan melihat kurva penawaran dan perubahan keseimbangan jumlah dan harga yang diakibatkannya apabila negara pengimpor menerapkan TBT. Anggap dulu TBT tidak ada, seperti yang dicatat sebagai lambang "0" di dalam gambar. Pasar mencapai keseimbangan di titik A, di mana kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran total di  $S_0^T$ . Bagi pengeksportor  $L$  yang mempunyai struktur biaya yang lebih rendah, maka pada harga keseimbangan  $p_0^*$ . Berarti ia harus memasok dalam jumlah lebih besar daripada  $H$  (bandingkan  $q_0^L$  dengan  $q_0^H$ ), dan selain itu pengeksportor  $H$  masuk ke pasar pada titik berikut setelah pengeksportor  $L$ . Perilaku kedua pengeksportor ini berubah sebaliknya apabila negara pengimpor menerapkan TBT yang cukup ketat; yang dilambangkan dengan "1" pada gambar. Pada keadaan ini, pasar mencapai titik keseimbangan D, yang menandakan harga keseimbangan  $p_1^*$  yang lebih tinggi dan jumlah (total)  $q_1^*$  yang lebih rendah. Jadi, dengan kemunculan TBT yang kaku, maka pengeksportor  $H$ —berhubung ia diandaikan mempunyai tingkat keefisienan yang lebih tinggi dalam memenuhi baku yang lebih tinggi—dialah



Sumber: Bratt (2014)

Gambar 1. Dampak tidak-setangkup TBT pada dua negara pengeksportor

penjual yang menguasai pasar. Lebih khusus lagi, pada harga keseimbangan yang baru, dampak tidak setangkup TBT menyebabkan pengeksport  $H$  memasok barang-barang dan pengeksport  $L$  sekarang menjual dalam jumlah yang lebih kecil,  $q_1$ . Pembalikan pangsa pasar ini menggambarkan bahwa dari pandangan pengeksport, yang menentukan adalah tidak hanya bagaimana suatu TBT mempengaruhi biaya produksinya sendiri, tetapi juga apa dampak TBT pada biaya produksi pengeksport lain.

Dalam banyak literatur TBT ini sering dianggap sama dengan penghambat bukan tarif/PBT atau *non-tariff barriers/NTB*, tetapi sesungguhnya TBT terdiri atas tindakan yang lebih luas daripada PBT, yang sampai saat ini umumnya dimaksudkan hanya sebagai TBT yang dikenakan pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap pemasok dalam negeri daripada luar negeri. Hal ini telah dijelaskan Gourdon dan Nicita (2012). Kerancuan ini terjadi karena dahulu sebagian besar TBT terwujud dalam hambatan kuota dan ekspor sukarela. Tindakan-tindakan ini memang dirancang untuk menghambat, sehingga disebut sebagai "penghambat". Namun, pada saat ini campur tangan kebijakan mempunyai banyak bentuk.

TBT dapat juga mencakup tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menggalakkan ekspor (bantuan dalam negeri, kredit investasi, dan lain lain), sehingga tidak mungkin dianggap sebagai "penghambat" perdagangan, atau pemerintah juga kadang-kadang menggunakan TBT untuk menjelaskan tindakan yang memantau impor dengan alasan yang masuk akal seperti prosedur karantina resmi. Oleh karena itu, alangkah lebih tepat menyebutnya sebagai "tindakan" daripada "penghambat" untuk menekankan bahwa tindakan tersebut mungkin saja tidak selalu mengurangi kesejahteraan atau perdagangan. Jadi jelaslah, bahwa PBT adalah bagian dari TBT, tetapi tidak semua TBT ada dalam PBT. Namun, untuk menetapkan apakah TBT adalah juga PBT tidaklah mudah. TBT memperlemah upaya pengeksportan barang, khususnya pertanian, dari negara berkembang. Peningkatan biaya akibat TBT dapat berdampak negatif terhadap perusahaan skala-kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk menyesuaikan proses produksi mereka terhadap baku negara lain. Namun, banyak peneliti juga menganggap bahwa TBT tidak selalu menjadi faktor negatif perdagangan,

seperti notifikasi kesepakatan SPS dan HBT. Hal itu karena mereka juga sering berfungsi untuk menetapkan baku mutu dan norma-norma yang mempermudah perdagangan. Demikian pula mereka dapat memperbaiki kesejahteraan kalau seandainya eksternalitas negatif atau ketidak-setangkupan informasi sintas (van Tongeren *et al.*, 2009 dan Beghin *et al.*, 2012), apalagi kalau para pengeksport mengumpulkan pengalaman (Peterson *et al.*, 2013).

### Metode Analisis

Dibandingkan dengan tarif, TBT relatif tidak banyak diteliti dan belum dapat dipahami para peneliti/ilmuwan, sehingga pendugaan dampaknya terhadap perdagangan dan kesejahteraan menjadi lebih rumit daripada tarif. Meskipun demikian, beberapa dari mereka telah mencoba melakukannya secara *ex post* dan *ex ante* (Korinek *et al.*, 2008).

Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan *ex ante*, menggunakan MKU dalam struktur persamaan GTAP (Hertel dan Tsigas, 1997) yang dimodifikasi Andriamananjara *et al.* (2003) dan telah digunakan Kenichi (2014). Model GTAP sendiri juga telah banyak digunakan untuk melihat dampak TBT, antara lain Fugazza dan Maur (2008) dan Mellado *et al.* (2010). Meskipun demikian, pemodelan TBT dengan menggunakan MKU masih dalam tahap awal pertumbuhannya (Fugazza dan Maur, 2008), apalagi terhadap negara berkembang karena masih sangat langka. Makalah ini merupakan salah satu upaya ke arah itu, karena kajian empiris TBT memang mengundang tantangan yang sangat besar, harus mengandalkan gugus data yang besar dan selaras, dan sering dengan andaian yang kuat.

Sesuai dengan namanya, sebagian besar model yang menggunakan basis data GTAP menyoroti dampak pengkajian kebijakan perdagangan, misalnya pemotongan hambatan perdagangan dunia terhadap perubahan produksi, arus perdagangan, konsumsi, penerimaan tarif dan pajak, upah tenaga kerja dan harga-harga, serta kesejahteraan ekonomi.

Tindakan atau kebijakan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah perubahan parameter *tms* (tarif impor) yang membuat celah antara harga dunia dan harga dalam negeri, dan *txs* (tarif ekspor) yang

mengekang kemampuan pengekspor mengekspor produknya, serta parameter *ams* untuk menangkap dampak kemudahan perdagangan mengikuti jejak Walkenhorst dan Yasui (2003) dalam Fugazza dan Maur (2008), serta Bauer dan Freytag (2013). Dampak perubahan prosedur di perbatasan mengandaikan bahwa kemudahan perdagangan terwujud dalam bentuk kemajuan teknis kegiatan perdagangan yang dapat disisipkan dalam model melalui koefisien *ams*.

Pendekatan ini, disebut "pendekatan bongkahan es" atau "iceberg approach" atau "debu di atas roda" ("sand in the wheels") oleh penulis lain (misalnya Fugazza dan Maur 2008). Melalui pendekatan ini, kemajuan teknologi akan memudahkan perdagangan. Akibatnya, kehilangan nilai barang pedagang sewaktu transit semakin kecil, sehingga harga barang di tempat/negara tujuan lebih murah (dan/atau membangkitkan penerimaan produsen).

Penulis mengikuti sebagian langkah yang dilakukan Kenichi (2014), yakni tarif impor barang (*i*) dari *r* (Indonesia) pada persamaan (1) dipotong tanpa kecuali di semua negara/kelompok negara/wilayah pengimpor (*s*):

$$pms(i,r,s) = tms(i,r,s) + pcif(i,r,s) \quad (1)$$

di mana:

*pms* = harga impor  
*tms* = tarif impor  
*pcif* = harga *cif*.

Pemotongan TBT memungkinkan penurunan biaya perdagangan terdiri atas dua bagian. Salah satu bagian adalah biaya perdagangan yang menggambarkan biaya yang berkaitan dengan perbedaan aturan antara dua negara, yang sifat utamanya sangat mirip dengan pajak. Oleh karena itu, pajak impor dikurangi untuk menilai dampak penurunan bagian biaya perdagangan TBT.

Yang kedua adalah bagian biaya rente, yang menggambarkan peningkatan harga akibat pemilahan pasar yang dipicu perbedaan aturan, yang mengurangi persaingan produk impor di pasar dalam negeri dan meningkatkan harga-harga produk dalam negeri. Perbaikan teknologi penambah impor (*ams*), dimasukkan dalam persamaan (2) untuk menggambarkan penurunan bagian biaya rente TBT sejalan dengan pendekatan yang dilakukan simulasi model GTAP terdahulu.

$$qxs(i,r,s) = -ams(i,r,s) + qim(i,s) - ESUBM(i) * [pms(i,r,s) - pim(i,s)] \quad (2)$$

di mana:

*qxs* = volume ekspor  
*ams* = perubahan teknologi penambah impor  
*qim* = impor agregat di wilayah  
*pim* = harga pasar komoditas impor gabungan; dan ESUBM adalah elastisitas substitusi di antara komoditas impor yang berasal dari negara tujuan yang berbeda-beda.

Empat macam pilihan kebijakan yang diuji adalah (1) pemotongan tarif impor (*tms*) sebesar 25%, sebagai Ske-1; (2) pemotongan tarif ekspor (*txs*) sebesar 25%, sebagai Ske-2; (3) peningkatan keefisienan fasilitas perdagangan (*ams*) sebesar 1%, sebagai Ske-3; dan (4) gabungan Ske-1 dan Ske-3, sebagai Ske-4. Angka perubahan 25% untuk tarif dipilih karena penulis berpandangan bahwa angka ini mungkin dapat dicapai dengan berbagai upaya yang sungguh-sungguh. Sedangkan peningkatan keefisienan kelancaran perdagangan dipilih hanya pada tingkat 1%, meskipun Shepherd dan Wilson (2009) menunjukkan bahwa arus perdagangan di ASEAN pada khususnya peka terhadap sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa berbagai negara di dunia masih sulit untuk menyelaraskan diri satu sama lain dalam hal TBT, sehingga perubahan yang mampu dicapai saat ini tidak terlalu ambisius, padahal pada tingkat agregasi yang berbeda penyelarasan aturan produk pangan telah mendorong perdagangan di antara negara-negara UE (de Frahan dan Vancauteran, 2006).

### Waktu dan Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2014 sampai bulan Maret 2015 dengan menggunakan data sekunder yang telah dihimpun oleh GTAP dalam basis data GTAP (Basis Data GTAP Versi 8.1 yang terakhir sampai saat ini, yang terdiri atas 57 sektor dan 134 wilayah dan menggambarkan perekonomian dunia tahun 2007) (Gehlhar et al., 2014).

Penulis melakukan agregasi wilayah menjadi 20 dan sektor menjadi 10 (pengelompokan komoditas dapat dilihat pada Lampiran 1 dan pengelompokan wilayah tertera pada Lampiran 2). serta faktor produksi dipertahankan tetap lima, yaitu lahan, tenaga kerja tak terampil, tenaga kerja terampil, modal, dan sumber daya alam. Pengelompokan wilayah dilakukan berdasarkan pertimbangan: kedekatan jarak/kewilayahan, "kesamaan" dan "kebersamaan" negara-negara yang ada di dalamnya dalam melakukan hubungan perdagangan/ekonomi dengan mitra mereka, termasuk Indonesia; sedangkan pengelompokan sektor diusahakan mempertahankan apa yang ada dalam data dasar GTAP dan yang terutama diekspor Indonesia ke luar negeri, tetapi kalau tidak memungkinkan, maka penggolongan didasarkan pada kedekatan dan sifat komoditas atau pos tarif yang ada di dalamnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perdagangan komoditas Indonesia dengan beberapa negara/kelompok negara yang menjadi sorotan dalam penelitian ini dinamis.

Dari kinerja ekspor 10 kelompok komoditas Indonesia selama 2004 sampai 2009, ada 7 komoditas yang mempunyai nilai kumulatif ekspor bersih positif, yaitu (berurutan dari nilai mutlak terbesar ke terkecil): kelompok **Oth\_sectors**, **Vegyoil**, **Woodpr**, **Tex**, **Othfoodpr**, **Ocr**, dan **B-t**. Artinya, setiap tahun Indonesia masih memperoleh devisa surplus dari pengekspor komoditas-komoditas ini; sedangkan yang lainnya, yaitu **Vegyfru**, **Oilseed**, dan **Pbfiber** mempunyai kecenderungan negatif (Tabel 1), yang berarti dalam enam tahun terakhir itu Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan untuk komoditas-komoditas tersebut.

Dari sisi tujuan ekspor, menarik untuk menganalisisnya dari nilai ekspor bersih kumulatif (dari 2004-2009) kelompok komoditas ke beberapa kelompok negara tujuan, sehingga dapat diketahui apakah Indonesia memperoleh devisa surplus atau defisit dari pengekspor ke negara tujuan tersebut (Tabel 2). Secara agregat, ekspor Indonesia yang memberi nilai positif selama masa enam tahun itu, tertuju terutama ke lima negara (diurut dari tertinggi ke terendah) yakni: Jepang, AS, *rest of the world* (ROW) atau negara lainnya, Korea, dan India yang membukukan penerimaan antara US\$ 16,825 miliar sampai US\$ 84,650 miliar; sedangkan

Tabel 1. Nilai ekspor bersih<sup>a</sup> beberapa kelompok komoditas<sup>b</sup> Indonesia, 2004-2009 (dalam US\$ juta)

Kelompok komoditas <sup>b</sup>	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah nilai kumulatif
<i>Oth_sectors</i>	17.258	14.394	26.484	20.005	12.699	7.467	98.307
<i>Vegyfru</i>	-113	-83	-181	-212	-327	-492	-1.408
<i>Oilseed</i>	-375	-389	-324	-509	-835	-835	-3.267
<i>Pbfiber</i>	-830	-679	-763	-902	-1.132	-744	-5.050
<i>Ocr</i>	1.075	1.391	1.548	1.431	2.071	2.123	9.639
<i>Vegyoil</i>	3.919	4.162	5.525	7.551	12.685	9.465	43.307
<i>Othfoodpr</i>	1.773	1.799	1.817	2.102	2.233	1.709	11.433
<i>B_t</i>	24	113	83	46	73	84	423
<i>Tex</i>	2.203	2.321	2.447	2.336	1.901	1.788	12.996
<i>Woodpr</i>	5.482	5.466	5.436	5.357	5.313	4.268	31.322
Total	30.416	28.495	42.072	37.205	34.681	24.833	197.702

<sup>a</sup> Nilai ekspor bersih suatu komoditas dihitung dari selisih nilai impor negara/kelompok negara dari Indonesia dengan nilai impor Indonesia dari negara/kelompok negara yang sama pada harga dunia yang tersedia dalam Basis Data GTAP Versi 8.1. Indikator ini digunakan karena selain mengekspor ke negara/kelompok negara tertentu, Indonesia juga mengimpor kelompok komoditas yang sama dari negara/kelompok negara tersebut.

<sup>b</sup> Pengelompokan sektor/komoditas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sumber: Walmsley *et al.* (2012), diolah.

Tabel 2. Nilai ekspor bersih kumulatif beberapa kelompok komoditas Indonesia ke beberapa negara/kelompok negara mitra, 2004-2009 (dalam US\$ juta)

Kode negara/kelompok negara	Kelompok komoditas <sup>a</sup>							Total
	<i>Oth_sectors</i>	<i>Vegyfru</i>	<i>Oilseed</i>	<i>Pbfiber</i>	<i>Ocr</i>	<i>Vegyoil</i>	<i>Othfoodpr</i>	
ROW	9.244	141	-265	-1.710	1.226	6.510	1.018	31.185
Timur Tengah	-16.196	34	0	-44	218	3.964	492	-6.293
Oseania	813	-167	-4	-962	25	215	-145	1.457
Cina_Hongkong	1.588	-1.820	-48	3	-305	8.431	-574	4.156
Jepang	71.958	13	5	-5	692	32	3.906	84.650
Korea	21.508	31	2	-5	49	443	252	20.925
Malaysia	-3.453	51	25	-2	2.183	3.623	-124	2.697
Filipina	6.303	16	32	-3	123	184	351	7.435
Singapura	-44.712	201	-5	-1	652	505	-173	-43.341
Thailand	-5.505	-283	3	-1	146	18	-51	-6.127
Vietnam	1.190	102	-22	7	15	675	312	2.803
Bangladesh	902	37	1	-5	12	1.966	12	3.303
India	5.172	391	-549	-374	142	11.813	-26	16.825
AS	39.676	-247	-2.445	-1.877	2.600	355	5.046	53.126
Belgia	3.032	14	0	-4	266	98	291	5.425
Jerman	237	36	3	-1	1.035	2.143	315	7.157
Belanda	399	8	0	0	177	-3	176	1.749
Spanyol	8.531	7	0	-6	101	732	246	10.799
Uni Soviet	-2.380	27	0	-60	282	1.603	109	-229
Total	98.307	-1.408	-3.267	-5.050	9.639	43.307	11.433	197.702

<sup>a</sup> Kelompok komoditas *B\_t*, *Tex*, dan *Woodpr* tidak dicantumkan karena nilainya relatif kecil, tetapi nilai total mencakup juga ketiga kelompok ini. Namun, dalam pembahasan selanjutnya, penulis hanya membahas lima kelompok yang menurut penulis sangat penting, yaitu *Oth\_sectors*, *Vegyoil*, *Othfoodpr* yang memberi surplus perdagangan dan *Vegyfru* dan *Oilseed* yang memberi defisit perdagangan.

Sumber: Walmsley *et al.* (2012).

perdagangan dengan negara mitra (diurut dari tertinggi ke terendah), yakni Singapura, Timur Tengah, Thailand, dan Uni Soviet, memberi nilai ekspor bersih agregat negatif pada Indonesia dengan nilai antara US\$ -229 juta sampai US\$ -43,341 miliar.

Apabila ekspor total dipilah ke dalam unsur-unsurnya, maka petanya akan berbeda. Untuk kelompok komoditas *Oth\_sectors*, lima negara tujuan memberikan nilai ekspor kumulatif positif (diurut dari tertinggi ke terendah), yakni Jepang, AS, Korea, ROW, dan Spanyol yang membukukan nilai sebesar antara US\$ 8,531 miliar sampai US\$ 71,958 miliar, sedangkan nilai ekspor negatif dialami dari perdagangan dengan (diurut dari tertinggi ke terendah): Singapura, Timur Tengah, Thailand, Malaysia, dan Uni Soviet dengan nilai berkisar dari US\$ -2,380 miliar sampai US\$ -44,712 miliar.

Basis nilai ekspor bersih kelompok komoditas *Vegyoil* relatif besar dan diekspor hampir ke semua kelompok negara. Lima negara tujuan utama yang memberikan nilai positif adalah India, Cina\_Hongkong, ROW, Timur Tengah, dan Malaysia, yang menghasilkan penerimaan US\$ 3,623 miliar sampai US\$ 11,813 miliar dan negara tujuan yang memberi nilai ekspor bersih negatif adalah Belanda, yaitu sebesar US\$ -3 juta. Nilai ini memang di luar dugaan, mengingat Belanda adalah negara tujuan utama ekspor *Vegyoil* yang di dalamnya terdapat minyak sawit mentah (MSM) atau *crude palm oil* (CPO). Namun, inilah nilai yang didapatkan dari Basis Data GTAP Versi 8.1. Pada kelompok komoditas *Othfoodpr*, nilai ekspor bersih dan laju pertumbuhannya sebagian besar positif. Dari lima negara tujuan ekspornya, yaitu AS, Jepang, ROW, Timur

Tengah, dan Filipina, Indonesia memperoleh nilai ekspor bersih yang positif berkisar dari US\$ 351 juta sampai US\$ 5,046 miliar, sedangkan dari perdagangannya (diurut dari tertinggi ke terendah), yakni Thailand, Malaysia, Oceania, Singapura dan Cina\_Hongkong dalam komoditas ini, Indonesia mengalami defisit, antara US\$ 51 juta sampai US\$ 574 juta.

Perdagangan kelompok **Vegyfru** Indonesia yang memberi nilai positif selama masa enam tahun itu, tertuju terutama ke lima negara (diurut dari tertinggi ke terendah), yakni India, Singapura, ROW, Vietnam, dan Malaysia dengan membukukan nilai ekspor bersih sekitar US\$ 51 juta sampai US\$ 391 juta; sedangkan negara mitra yang memberi nilai ekspor agregat negatif adalah (diurut dari tertinggi ke terendah), yakni Cina\_Hongkong, Thailand, AS, dan Oceania dengan nilai defisit antara US\$ -167 juta sampai US\$ -1.820 juta.

Basis nilai ekspor bersih kelompok komoditas **Oilseed** sangat kecil karena nilai ekspornya sangat kecil dan impornya relatif besar dan hanya terkait dengan jumlah Negara yang sedikit, yaitu Cina\_Hongkong, India, ROW, Filipina, dan Malaysia. Nilai ekspor bersih positif terutama diperoleh dari Filipina dan Malaysia dengan perolehan pendapatan devisa sebesar antara US\$ 25 juta sampai US\$ 32 juta; sedangkan perdagangan dengan AS, India, ROW, Cina\_Hongkong, dan Vietnam adalah defisit, yang nilainya berkisar dari US\$ -22 juta sampai US\$ -2,445 miliar.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Pemikiran, tidaklah mudah mengidentifikasi tindakan bukan tarif/TBT, tetapi dari beberapa negara/kelompok negara tersedia informasi umum tentang perkara ini:

Pada kasus Amerika Serikat/AS, jika ingin mengekspor bahan pangan, minuman ringan, dan bahan diet untuk konsumsi manusia atau ternak/hewan, maka para pengeksportur harus memenuhi berbagai aturan yang dilaksanakan oleh Kantor Pangan dan Obat-obatan AS atau *United States food and drugs administration/US FDA*. Aturan-aturan tersebut antara lain (1) *U.S. FDA Registration & U.S. Agent Requirement (U.S. FDA Bioterrorism Act)*, (2) *Prior Notice Express (Sending Food and Beverages to the USA)*, (3) *Food Canning Establishment/FCE and Process Filings (SID) FCE-SID Examples, Food, Beverage & Supplement Labeling; and*

*Ingredients Review*, (4) *Food Contact Substances/FCS*, (5) *Food Color Additives and Food Color Batch Certification*, (6) *U.S. FDA Food Safety Services*; dan (7) *Detention Without Physical Examination/DWPE Assistance*.

Pada kasus Belanda, pajak pertambahan nilai/PPN akan dikenakan pada penjualan barang dan jasa yang dijual di dalam negeri. Berbeda dari bea cukai yang bernilai sama untuk semua anggota UE, PPN ditetapkan otoritas pajak setiap negara dan berbeda satu negara dengan negara yang lain. Berikut adalah ringkasan dari tingkat PPN Belanda: (1) bernilai 0% untuk barang yang diekspor; (2) bernilai 6% untuk barang kebutuhan pokok seperti pangan, obat-obatan, dan angkutan, dan (3) untuk barang lainnya, secara umum atau bakunya sekitar 19%.

Pada kasus Uni Eropa, salah satu bentuk penerapan kebijakan keamanan pangan UE adalah Sistem Peringatan Cepat pada Pangan dan Pakan/SPCPP atau *Rapid Alert System on Food and Feed/RASFF*. Penerapan kebijakan keamanan pangan melalui SPCPP memang dapat dimaklumi dan diterima secara sah oleh pihak manapun, tetapi hal ini berpotensi merugikan posisi Indonesia bila pada pelaksanaannya memunculkan sikap perlindungan yang berlebihan. Beberapa kasus yang ditemukan oleh Bank Dunia memberikan gambaran mengenai dampak penerapan kebijakan keamanan pangan UE yang dapat meningkatkan ongkos produksi di negara berkembang hingga ratusan juta dolar AS per tahun. Untuk Indonesia, SPCPP berdampak cukup menonjol pada ekspor produk perikanan nasional (Pasadilla dan Liao, 2007). Banyak pengeksportur ke pasar UE mengeluh bahwa baku mutu produk pangan UE lebih ketat daripada aturan antarbangsa, seperti *Codex Alimentarius* dan *OIE* dan untuk memenuhinya membutuhkan biaya yang mahal.

### Simulasi Kebijakan Pemotongan Tindakan Tarif dan Bukan Tarif/TBT

Pemotongan tarif impor di negara tujuan ekspor, pemotongan pajak ekspor/bea keluar, serta peningkatan efisiensi diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri, neraca perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil empirisnya dibahas dalam anakbab-anakbab berikut ini. Namun demikian, perlu



juga dikemukakan bahwa hasil-hasil ini adalah prakiraan, sehingga perlu dibaca dan ditafsirkan secara hati-hati.

### Terhadap produksi dalam negeri

Tabel 3 mencatat bahwa semua skenario memberikan peningkatan dalam produksi **Vegyfru dan Vegyoil**, dan untuk **Oilseed, Othfoodpr** dan **Oth\_sectors** beberapa skenario menunjukkan peningkatan, tetapi beberapa skenario lainnya menunjukkan penurunan. Khusus untuk **Othfoodpr**, Ske-2, yaitu pemotongan pajak ekspor menurunkan produksi sektor/industri ini. Ini dapat terjadi karena bahan baku produk olahan ini semakin menyusut di dalam negeri dengan penurunan pajak ekspor tersebut.

lemak nabati. Ini dapat dimengerti karena industri ini memang selalu mendapat perlindungan di banyak negara melalui instrumen tarif impor atau TBT dan pada saat yang sama dikekang pengeksporannya oleh negara pengekspor melalui tarif ekspor untuk mendapatkan pendapatan negara, sehingga produksi dalam negeri dengan sendirinya terkekang. Sementara itu, peningkatan keefisienan (Ske-3) tidak selamanya meningkatkan produksi di dalam negeri dan kalau dikombinasikan dengan kebijakan pemotongan tarif di negara tujuan cenderung menguatkan atau mengubah arah dampak pemotongan tarif, seperti diperlihatkan oleh semua angka-angka perubahan di bawah lajur 4 (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil simulasi dampak berbagai skenario kebijakan terhadap produksi dalam negeri beberapa sektor/industri pertanian (%)

Sektor/industri	Ske-1	Ske-2	Ske-3	Ske-4
<b>Vegyfru</b>	0,14	0,03	0,03	0,17
<b>Oilseed</b>	3,11	0,08	-0,13	2,98
<b>Vegyoil</b>	7,20	0,21	0,21	7,41
<b>Othfoodpr</b>	0,23	-0,01	0,09	0,32
<b>Oth_sectors</b>	-0,28	0,00	-0,02	-0,30

Selanjutnya, untuk sektor **Oilseed** dan **Oth\_sectors** skenario yang memberikan penurunan produksi mereka adalah Ske-3, yaitu peningkatan efisiensi (kemudahan perdagangan, termasuk di dalamnya). Hal ini tentu saja terjadi akibat produk-produk sejenis mengalir deras ke dalam negeri dengan kemudahan perdagangan. Dari tabel ini terlihat bahwa Ske-1, yaitu pemotongan tarif impor semua kelompok komoditas yang diimpor berbagai negara dari Indonesia akan meningkatkan produksi **Vegyfru, Oilseed, Vegyoil**, dan **Othfoodpr** dalam negeri, yang berkisar antara 0,14% sampai 7,20%, sedangkan produksi **Oth\_sectors** menurun, yang mungkin disebabkan perubahan alokasi sumber daya.

Perubahan produksi terbesar dialami industri **Vegyoil**, yaitu kelompok minyak dan

### Terhadap neraca perdagangan

Pemotongan tarif impor di negara tujuan ekspor, pemotongan pajak ekspor/bea keluar, serta peningkatan efisiensi diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bersih Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena dengan hambatan perdagangan dan TBT yang semakin berkurang, arus produk ekspor Indonesia ke luar negeri semakin lancar dan harga di negara tujuan semakin bersaing. Namun, hal yang sama juga berlaku bagi komoditas yang diimpor Indonesia akan semakin lancar memasuki pasar dalam negeri. Anak bab ini memuat hasil-hasilnya, tetapi dikhususkan pada paling banyak tiga negara mitra yang memberikan neraca perdagangan positif terbesar, karena penulis meyakini bahwa ke tiga negara tujuan inilah kinerja perdagangan Indonesia mempunyai potensi besar untuk

dikembangkan melalui perubahan kebijakan dan perundingan perdagangan secara bilateral, multilateral, dan atau regional.

Untuk sektor **Vegyfru**, dengan semua skenario yang dipilih neraca perdagangan dengan India diperkirakan akan defisit, yang berkisar antara US\$ -1,98 juta sampai US\$ -29,95 juta (Tabel 4). Penurunan terbesar justru terjadi melalui pemotongan tarif ekspor. Ini kemungkinan berkaitan dengan fenomena yang disebut pengalihan perdagangan (*trade diversion*) oleh India dari Indonesia ke negara-negara lain atau penciptaan perdagangan (*trade creation*) ke negara-negara penghasil **Vegyfru** yang sebelumnya belum pernah menjadi mitra dagang atau kelompok kawasan perdagangan bebas India. Namun, isu ini tidak didalami dalam makalah ini. Mungkin dapat dikaji lebih khusus dalam kesempatan lain. Bagi kelompok **Oilseed**, semua skenario yang dicoba menurunkan neraca perdagangan Indonesia dengan Filipina, antara US\$ -0,01 juta sampai US\$ -1,45 juta, sedangkan dengan Malaysia kebijakan pemotongan tarif lebih menguntungkan dan lebih kuat daripada peningkatan keefisienan perdagangan.

Neraca perdagangan **Vegyoil** Indonesia dengan tiga negara mitranya juga cenderung menurun dengan pemotongan tarif impor, pemotongan pajak ekspor, dan peningkatan keefisienan di negara mitra tersebut, kecuali di kelompok ROW dengan kebijakan pemotongan tarif ekspor. Ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa dengan keadaan perdagangan yang makin terbuka dalam hal tarif impor atau ekspor makin rendah dan hambatan-hambatan teknis dan bukan-teknis makin hilang, konfigurasi perdagangan tentu akan berubah. Apakah perubahan ini kondusif dalam mendukung kinerja perdagangan **Vegyoil** Indonesia?

Hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Walau masing-masing kebijakan pemotongan tarif impor atau peningkatan efisiensi produksi memberikan persentase perubahan pada tingkat tertentu, kombinasi keduanya memperbesar lagi persentase perubahan ini, yang tidak sekedar penjumlahan perubahan keduanya. Sebagai contoh, persentase penurunan neraca perdagangan Indonesia dengan India akibat kebijakan pemotongan tarif di India dan seluruh dunia hanya sekitar US\$ -177,52 juta, dan akibat peningkatan efisiensi di seluruh dunia senilai US\$ -13,70 juta, tetapi kombinasi keduanya menyebabkan persentase perubahan yang jauh lebih tinggi,

yakni US\$ -191,22 juta. Penjelasannya sama dengan yang disebutkan sebelumnya, yakni potensi kemunculan pengalihan perdagangan dan atau penciptaan perdagangan melalui kawasan perdagangan bebas, di mana India mendapatkan sumber-sumber **Vegyoil** baru (Tabel 4).

Untuk produk **Othfoodpr**, kebijakan pemotongan pajak ekspor meningkatkan neraca perdagangan dengan AS, Jepang, dan ROW, dengan kisaran US\$ 89,30 juta sampai US\$ 335,64 juta, sementara kebijakan pemotongan tarif impor dan kombinasinya dengan peningkatan efisiensi perdagangan menyebabkan penurunan neraca perdagangan Indonesia dengan semua negara mitranya dengan kisaran US\$ -3,64 juta sampai US\$ -138,64 juta (Tabel 4). Lagi-lagi, faktor efisiensi teknologi yang berkembang di seluruh dunia membuat pertumbuhan neraca perdagangan makin menurun. Kemungkinan penyebabnya karena Indonesia juga melakukan pemotongan impor dan peningkatan efisiensi sendiri, tentu saja **Othfoodpr** dari luar akan menyerbu masuk ke pasar dalam negeri. Untuk kelompok **Oth\_sectors**, semua skenario memperlihatkan perubahan positif dalam neraca perdagangan Indonesia dan Jepang serta Indonesia dan AS. Sementara, perdagangan dengan Korea diproyeksikan menurun antara US\$ -19,06 juta sampai US\$ -201,64 juta, kecuali oleh skenario pemotongan pajak ekspor yang memberikan perubahan US\$ 21,76 juta.

Peningkatan keefisienan perdagangan di sektor ini juga memperkuat dampak kebijakan-kebijakan yang dipertimbangkan, yakni kalau dampaknya sudah negatif (positif) akan makin besar nilai negatif (positif)-nya. TBT berpengaruh langsung pada ekspor MSM Indonesia dengan penurunan permintaan konsumsi minyak sawit pada tahun 2012 sebesar 5,88%, sedangkan di tahun sebelumnya (2010) nilai ekspor MSM sebesar 6,79%, lalu menurun di tahun 2011 menjadi 6,10%, dengan ditandai penurunan ekspor sebesar -13,66%, yaitu dari 979.876 ton menjadi 846.032 ton. Dampak lainnya adalah sejumlah perusahaan asing yang menjadikan minyak sawit sebagai bahan bakar utama memilih untuk melepaskan kerja sama dengan Indonesia. Ekspor salak Indonesia ke Tiongkok terganjal aturan di sana karena tingkat kadmium yang terkandung di dalamnya, dan de Almeida *et al.* (2012) menemukan bahwa penerapan TBT telah menghambat perdagangan kopi biji selama ini.

Tabel 4. Hasil simulasi dampak berbagai skenario kebijakan terhadap neraca perdagangan Indonesia

Skenario	Sektor/industri													
	Vegyfru			Oilseed			Vegyoil			Othfoodpr			Oth_sectors	
	Negara/ kelompok negara	Dalam USD juta	Negara/ kelompok negara	Dalam USD juta	Negara/ kelompok negara	Dalam USD juta	Negara/ kelompok negara	Dalam USD juta	Negara/ kelompok negara	Dalam USD juta	Negara/ kelompok negara	Dalam USD juta	Negara/ kelompok negara	Dalam USD juta
Ske-1	India	-1,98	India		India	-177,52	AS		AS		-3,81	Jepang		75,49
	Singapura	-0,28	Filipina	-0,02	Cina_Hongkong	-3,98	Jepang		Jepang		-9,44	AS		108,37
	ROW	-7,26	Malaysia	5,38	ROW	-289,37	ROW		ROW		-24,15	Korea		-19,06
Ske-2	India	-29,95	India		India	-70,93	AS		AS		158,26	Jepang		453,70
	Singapura	-0,35	Filipina	-0,01	Cina_Hongkong	-85,00	Jepang		Jepang		89,30	AS		1.748,63
	ROW	91,30	Malaysia	-1,52	ROW	206,46	ROW		ROW		335,64	Korea		21,76
Ske-3	India	-5,53	India		India	-13,70	AS		AS		0,17	Jepang		2.033,24
	Singapura	4,79	Filipina	-1,45	Cina_Hongkong	-71,65	Jepang		Jepang		-62,45	AS		5.338,95
	ROW	-125,13	Malaysia	-4,01	ROW	-53,10	ROW		ROW		-114,49	Korea		-182,58
Ske-4	India	-7,51	India		India	-191,22	AS		AS		-3,64	Jepang		2.108,72
	Singapura	4,51	Filipina	-1,42	Cina_Hongkong	-75,63	Jepang		Jepang		-71,89	AS		5.447,32
	ROW	-132,39	Malaysia	1,37	ROW	-342,48	ROW		ROW		-138,64	Korea		-201,64

### Terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia

Semua skenario yang dipertimbangkan memberi peningkatan kesejahteraan bagi Indonesia dan dunia, antara US\$ 16 juta sampai US\$ 1,734 miliar (Tabel 5). Hasil penelitian Disdier dan Marette (2010) menunjukkan baku produk yang lebih ketat mendorong peningkatan baik kesejahteraan dalam negeri dan antarbangsa. Hasil sebaliknya didapatkan Cadot dan Gourdon (2014) di Afrika, di mana biaya masyarakat miskin meningkat sebesar 9%.

Bagi Indonesia, kebijakan peningkatan keefisienan perdagangan di seluruh dunia memberikan manfaat yang paling besar dibandingkan dengan kebijakan pemotongan tarif impor atau pemotongan tarif ekspor (Bandingkan US\$ 897 juta dengan US\$ 16 juta dan US\$ 836 juta di Tabel 5). Nilai ini akan makin meningkat dengan kebijakan peningkatan keefisienan perdagangan karena dampak kombinasi kedua kebijakan ini merupakan penjumlahan matematis dampak masing-masing kebijakan. Bandingkan US\$ 1,734 miliar dengan US\$ 897 juta.

pada perdagangan dan kesejahteraan adalah rumit karena mereka sering merupakan bagian dari sebuah paket tolok-ukur daripada sebagai alat tersendiri dan sering terpaut dengan kuota tarif atau *tariff rate quota/ TRQ*, tarif dan campur-tangan pemerintah dalam pasar pertanian lainnya. Manfaat kesejahteraan total yang diharapkan dari unsur kemudahan perdagangan yang dimungkinkan oleh kesepakatan perdagangan di Asia adalah sebesar US\$ 9 miliar setiap tahun (Hertel *et al.*, 2001),

Yang menarik juga untuk dicatat adalah bahwa peningkatan kesejahteraan yang terjadi dari Ske-1 untuk masyarakat Indonesia adalah berkat nilai tukar perdagangan yang makin mendukung daripada peningkatan keefisienan alokatif, meskipun investasi dan tabungan menyumbang penurunan kesejahteraan. Sebaliknya dari Ske-2, meskipun nilai tukar perdagangan menurunkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi diimbangi oleh keefisienan alokatif yang lebih besar sehingga kesejahteraan makin meningkat.

Sementara itu, meskipun keefisienan teknis tidak memberi pengaruh apa-apa

Tabel 5. Hasil simulasi dampak berbagai skenario kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia (dalam US\$ juta)

Kesejahteraan	Ske-1		Ske-2		Ske-3		Ske-4	
	Indonesia	Dunia	Indonesia	Dunia	Indonesia	Dunia	Indonesia	Dunia
Keefisienan alokasi	112,90	588,58	28,13	9.123,99	91,19	15.908,31	204,09	16.496,89
Keefisienan teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	794,21	108.489,15	794,21	108.489,15
Nilai tukar perdagangan	806,38	0,00	-12,86	0,00	-13,98	0,00	792,40	0,00
Investasi dan tabungan	-82,34	0,00	1,28	-0,01	25,71	-0,01	-56,63	-0,01
Total	836,94	588,58	16,55	9.123,98	897,13	124.397,45	1.734,07	124.986,03

Di tingkat dunia, peningkatan kesejahteraan lebih tinggi akibat peningkatan keefisienan perdagangan dibandingkan dari akibat kebijakan pemotongan tarif ekspor dan yang terakhir ini lebih besar daripada akibat pemotongan tarif (Bandingkan US\$ 124,397,45 miliar dengan US\$ 9,123,98 miliar dan dengan US\$ 588,58 juta). Namun, sebagaimana dinyatakan Orden *et al.* (2012), dampak TBT

(sumbangannya terhadap kesejahteraan tidak ada) pada Ske-1 dan Ske 2, tetapi pada Ske-3 (peningkatan efisiensi perdagangan) justru kebijakan ini yang secara menyolok memberi peningkatan kesejahteraan untuk mengimbangi pengaruh negatif nilai tukar perdagangan. Bahkan di tingkat dunia, keefisienan teknis ini paling dominan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dengan proses penggunaan masukan produksi yang semakin efisien, maka produk dapat dihasilkan secara efisien yang selanjutnya mendorong arus perdagangan komoditas yang makin efisien pula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan efisiensi perdagangan sejagat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun menurunkan beberapa produk ekspor Indonesia.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Perdagangan komoditas Indonesia dengan beberapa negara/kelompok negara yang menjadi sorotan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan beberapa negara mitra, Indonesia mendapatkan neraca perdagangan positif atau negatif. Tujuh komoditas yang mempunyai kecenderungan nilai kumulatif ekspor bersih positif, yaitu (berurutan dari nilai mutlak terbesar ke terkecil) kelompok **Oth\_sectors**, **Vegyoil**, **Woodpr**, **Tex**, **Othfoodpr**, **Ocr**, dan **B-t**; sedangkan yang lainnya, yaitu **Vegyfru**, **Oilseed**, dan **Pbfiber** mempunyai kecenderungan negatif.

Ekspor agregat Indonesia yang memberi nilai positif selama masa enam tahun (2004 sampai 2009), tertuju terutama ke lima negara (diurut dari tertinggi ke terendah), yakni: Jepang, AS, Korea, ROW, dan Spanyol yang membukukan penerimaan antara US\$ 16,825 miliar sampai US\$ 84,650 miliar; sedangkan perdagangan dengan negara mitra (diurut dari tertinggi ke terendah) yakni Singapura, Timur Tengah, Thailand, dan Uni Soviet, memberi nilai ekspor bersih agregat negatif pada Indonesia dengan nilai antara US\$ -229 juta sampai US\$ -43,341 miliar.

Semua simulasi skenario yang dipertimbangkan memberikan peningkatan dalam produksi **Vegyfru** dan **Vegyoil**, dan untuk **Oilseed**, **Othfoodpr** dan **Oth\_sectors** beberapa skenario menunjukkan peningkatan, tetapi beberapa lainnya menunjukkan penurunan. Pemotongan tarif impor semua kelompok komoditas yang diberlakukan berbagai negara terhadap komoditas yang diimpor dari Indonesia akan meningkatkan produksi dalam negeri Indonesia hampir semua kelompok komoditas, kecuali

**Oth\_sectors**, yang berkisar antara 0,14% sampai 7,20%.

Semua skenario yang dipertimbangkan memberi peningkatan kesejahteraan bagi Indonesia dan dunia, antara US\$ 16 juta sampai US\$ 1,734 miliar. Bagi Indonesia kebijakan peningkatan keefisienan perdagangan di seluruh dunia memberikan manfaat yang paling besar dibandingkan dengan kebijakan pemotongan tarif impor atau pemotongan tarif ekspor. Di tingkat dunia, peningkatan kesejahteraan lebih tinggi akibat peningkatan keefisienan perdagangan dibandingkan dari akibat kebijakan pemotongan tarif ekspor dan yang terakhir ini lebih besar daripada akibat pemotongan tarif.

Peningkatan kesejahteraan yang terjadi dari Ske-1 untuk masyarakat Indonesia adalah berkat nilai tukar perdagangan yang makin mendukung daripada peningkatan keefisienan alokatif. Bahkan investasi dan tabungan menyumbang penurunan kesejahteraan. Sedangkan dari Ske-2, sebaliknya nilai tukar perdagangan menurunkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi diimbangi oleh keefisienan alokatif yang lebih besar, sehingga kesejahteraan makin meningkat. Sementara itu, meskipun keefisienan teknis tidak memberi pengaruh apa-apa (sumbangannya terhadap kesejahteraan tidak ada) pada Ske-1 dan Ske-2, tetapi pada Ske-3 (peningkatan efisiensi perdagangan) justru kebijakan ini yang secara menyolok memberi peningkatan kesejahteraan untuk mengimbangi pengaruh negatif nilai tukar perdagangan.

### Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang dapat disampaikan antara lain Indonesia perlu secara aktif mengikuti perkembangan kebijakan yang menyangkut tindakan bukan tarif/TBT dari sisi jenis, besaran, dan sifatnya untuk setiap pos tarif komoditas pertanian yang lebih rinci yang dilakukan negara-negara mitra. Angka-angka ini diperlukan untuk menduga dan membangun nilai kesetaraan tarif (*ad-valorem equivalent*) agar penentuan dampak kuantitatifnya dapat lebih tepat lagi. Dengan demikian, pengetahuan yang mendalam tentang daya bertahan dan daya serang perdagangan suatu negara mitra dan Indonesia sendiri dapat diperoleh.

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan pengintensifan perundingan tentang peningkatan efisiensi perdagangan di forum multilateral (OPD) agar kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga dunia makin meningkat. Peningkatan akan lebih besar lagi kalau seluruh negara mitra mengurangi tindakan tarif dan bukan-tarif mereka, meskipun memang lebih sulit dicapai karena negara-negara enggan kehilangan kedaulatannya (Carrere dan de Mello, 2011). Indonesia juga seyogyanya membangun agenda lobi dan pendukung kebijakan untuk menyasati pemotongan dan penghapusan TBT yang dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perekonomian nasional. Untuk itu kerja sama instansi pemerintah dan para pelaku usaha (prapanen, panen, dan pascapanen) produk pertanian sangat diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriamananjara, S., M. Ferrantino, and M. Tsigas. 2003. Alternative approaches in estimating the economic effects of non-tariff measures results from newly quantified measures. Office of Economics Working Paper No. 2003-12-C. Washington, DC: U.S. International Trade Commission.. <http://www.usitc.gov> (20 Desember 2013).
- Bacchetta, M. and C.Beverelli. 2012. Non-tariff measures and the WTO. <http://www.voxeu.org/article/trade-barriers-beyond-tariffs-facts-and-challenges> (20 Desember 2014).
- Bauer, M. and A. Freytag. 2013. Cumulative benefits from trade liberalization for the South African economy. Jena Economic Research Papers # 2013-036. <http://zs.thulb.uni-jena.de/> (15 Januari 2015).
- Beghin, J., A. C. Disdier, S. Marette, and F. van Tongeren. 2012. Welfare costs and benefits of non-tariff measures in trade: a conceptual framework and application. *World Trade Review* 11(3):356-375. doi:10.1017/S1474745612000201. (2 Februari 2015).
- Bradford, S. 2005. The extent and impact of food non-tariff barriers in rich countries. In: P. Dee and M. Ferrantino (eds). *Quantitative Methods for Assessing the Effects of Non-Tariff Measures and Trade Facilitation*. Singapore: APEC Secretariat.
- Bratt, M. 2014. Estimating the bilateral impact of non-tariff measures (NTMs). WPS 14-01-1. Geneva: Department of Economics, University of Geneva. <http://www.unige.ch/ses/dsec/repec/files/14011.pdf> (2 Februari 2015).
- Cadot, O. and J. Gourdon. 2014. Assessing the price-raising effect of non-tariff measures in Africa. *Journal of African Economies* 23(4):425-463. doi:10.1093/jae/eju007 (18 Juni 2014).
- Cadot, O., and M. Malouche. 2012. Overview. In: O. Cadot and M.M. Malouche (eds.). *Non-Tariff Measures – A Fresh Look at Trade Policy's New Frontier*. pp. 57-89. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. [http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/NTMs\\_A\\_Fresh\\_Look\\_Complete.pdf](http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/NTMs_A_Fresh_Look_Complete.pdf) (2 Februari 2015).
- Cadot, O., M. Malouche, and S. Sáez. 2012. Streamlining Non-Tariff Measures: A Toolkit for Policy Makers. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development/International Development Association or The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6019/683590PUB0EPI007902B009780821395103.pdf?sequence=1>. (9 Februari 2015)
- Carrere, C. and J. de Melo. 2011. Non-tariff measures: what do we know, what should be done? *Journal of Economic Integration* 26:169-96.
- de Almeida, F., M.F.M. Gomes, and O.M. da Silva. Non-tariff measures in international coffee trade. Selected poster prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August 2012. [http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/126538/2/Non-tariff measures in international coffee trade\\_IAAE Conference.pdf](http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/126538/2/Non-tariff%20measures%20in%20international%20coffee%20trade_IAAE%20Conference.pdf) (9 Februari 2015).
- de Frahan, B.H. and M. Vancauteran. 2006. Harmonisation of food regulations and trade in the single market: evidence from disaggregated data. *Eur. Rev. Agric. Econ.* 33(3):337-360.
- Deb, U.K. 2006. Rules of origin and non-tariff barriers in agricultural trade: perspectives from Bangladesh and Cambodia. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series No. 12. <http://www.artnetontrade.org> (15 Januari 2015).
- Deardorff, A. 2012. ITC Seminar Series - Non-tariff measures: new challenges and the road ahead. Geneva, 03 February 2012.

- Devadoss, S. 2009. Domestic sale requirement, price supports, export quota, and inefficiencies. *Journal of International Trade & Economic Development* 18(2):297–309.
- Disdier, A.C. and L. Fontagné. 2008. The Impact of regulations on agricultural trade: evidence from the SPS and TBT agreements. *Am. J. Agr. Econ.* 90(2):336-350.
- Disdier, A.C. and S. Marette. 2010. The combination of gravity and welfare approaches for evaluating nontariff measures. *Am. J. Agr. Econ.* 92(3):713-726.
- ECORYS Nederland BV. 2009. Non-tariff measures in EU-US trade and investment – an economic analysis. Final Report. <http://trade.ec.europa.eu>. (7 Juli 2013).
- Fugazza, M. and J.C. Maur. 2008. Non-tariff barriers in computable general equilibrium modelling. *Journal of Policy Modeling* 30(3):475–490. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893807001184> (4 Januari 2015).
- Fugazza, M. 2013. The Economics behind non-tariff measures: theoretical insights and empirical evidence. *Policy Issues in International Trade and Commodities. Study Series No. 57*. Geneva: UNCTAD. <http://unctad.org> (13 Februari 2015).
- Gehlhar, M., A. Aguiar, R. McDougall, and B. Narayanan. 2014. Construction of the trade data for the GTAP data base. Paper prepared for Organized Session on Different Approaches to Reconcile World Trade Asymmetries at the 22<sup>nd</sup> International Input-Output Conference, Lisbon, Portugal, July 2014. [https://www.iioa.org/.../1803\\_20140510051\\_ConstructingofTradeDatafor...](https://www.iioa.org/.../1803_20140510051_ConstructingofTradeDatafor...) (9 April 2015).
- Gourdon, J. and A. Nicita. 2012. NTMs: Interpreting the new data. In: O. Cadot and M.M. Malouche (eds.). *Non-Tariff Measures – A Fresh Look at Trade Policy's New Frontier*. pp. 57-89. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. [http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/NTMs\\_A\\_Fresh\\_Look\\_Complete.pdf](http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/NTMs_A_Fresh_Look_Complete.pdf) (9 Februari 2015).
- Hertel, T., W., T. Walmsley, and K. Itakura. 2001. Dynamic effect of the "new age" free trade agreement between Japan and Singapore. *Journal of Economic Integration* 16 (4):446-84.
- Hertel, T. and M. Tsigas. 1997. "Structure of the GTAP model". In: T. Hertel (ed.), *Global Trade Analysis: Modeling and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [ITC] International Trade Centre. 2013. More than a third of Indonesia's exporters affected by non-tariff measures. [http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About\\_ITC/Press/Articles/More%20than%20a%20third%20of%20Indonesia%E2%80%99s%20exporters%20affected%20by%20non-tariff%20measures%2815%29.pdf](http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Press/Articles/More%20than%20a%20third%20of%20Indonesia%E2%80%99s%20exporters%20affected%20by%20non-tariff%20measures%2815%29.pdf) (2 Februari 2015).
- Kenichi, K. 2014. The relative significance of EPAs in Asia-Pacific. RIETI Discussion Paper Series 14-E-009. The Research Institute of Economy, Trade and Industry. <http://www.rieti.go.jp/en/> (2 Februari 2015).
- Korinek, J., M. Melatos, and M.L. Rau. 2008. A review of methods for quantifying the trade effects of standards in the agri-food sector. OECD Trade Policy Working Paper No. 79 OECD. <http://www.oecd.org> (3 Februari 2015).
- Limao, N. and P. Tovar. 2011. Policy choice: theory and evidence from commitment via international trade agreements. *Journal of International Economics* 85(2):186–205.
- Mellado, A.G., S.H. Gay, R. M'Barek, and E. Ferrari. 2010. Evaluation of non-tariff measures for African agricultural exports to the EU in a CGE framework. <http://www.gtap.agecon.purdue.edu> (12 Januari 2015).
- Orden, D., J. Beghin, and G. Henry. 2012. Key findings of the NTM-IMPACT project. <https://www.econ.iastate.edu/sites/default/files/publications/papers/p15279-2012-07-20.pdf> (15 Februari 2014).
- Pasadilla, G.O. and C.M.M. Liao. 2007. Market access limitations of the Philippines in the EU market. Discussion Paper Series No. 2007-15. <http://www.saber.eaber.org> (7 Juli 2013).
- Peterson, E., J. Grant, D. Roberts, and V. Karov. 2013. Evaluating the trade restrictiveness of phytosanitary measures on U.S. fresh fruit and vegetable imports. *Am. J. Agr. Econ.* 95(4):842-858.
- Ray, E.J. 1981. The determinants of tariff and nontariff trade restrictions in the United States. *Journal of Political Economy* 89(1):105–21.
- Shepherd, B. and J.S. Wilson. 2009. Trade facilitation in ASEAN member countries: measuring progress and assessing priorities. *Journal of Asian Economics* 20(4):367–383. <http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2009.03.001> (8 Januari 2015).

- UNCTAD. 2010. Non-tariff measures: evidence from selected developing countries and future research agenda (UNCTAD/DITC/TAB/2009/3). New York and Geneva. <http://unctad.org> (7 Februari 2015).
- USAID. 2013. Nontariff barriers to trade: regional agricultural trade environment (RATE) summary. USAID Regional Development Mission for Asia. [http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Nontariff\\_barriers.pdf](http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Nontariff_barriers.pdf) (2 Februari 2015).
- van Tongeren, F., J. Beghin, S. Marette. 2009. A cost-benefit framework for the assessment of non-tariff measures in agro-food trade; OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers No. 21. OECD Publishing. doi: 10.1787/220613725148.
- Walmsley, T.L., A.H. Aguiar, and B. Narayanan. 2012. Introduction to the global trade analysis project and the GTAP Data Base. GTAP Working Paper No. 67. <http://www.gtap.agecon.purdue.edu> (3 Maret 2015).
- WTO. 2012. World Trade Report 2012. Trade and public policies: a closer look at non-tariff measures in the 21<sup>st</sup> century. [http://www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/wtr12\\_e.htm](http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr12_e.htm) (30 Agustus 2012).



## Lampiran 1. Pengelompokan sektor/komoditas basis data GTAP untuk analisis

Kode sektor	No.	Deskripsi sektor
oth_sectors	1	<i>Rest of economic sector</i> atau sector ekonomi lainnya
Vegyfru	2	<i>Vegetable and fruit</i> atau sayur dan buah
Oilseed	3	<i>Oil seed</i> atau biji-bijian mengandung minyak
Pbfiber	4	<i>Plant based fibers</i> atau serat berasal dari tumbuhan
Ocr	5	<i>Other crops</i> atau tanaman lainnya
Vegyoil	6	<i>Vegetable oil and fats</i> atau minyak dan lemak nabati
othfoodpr	7	<i>Processed food</i> atau pangan olahan
b_t	8	<i>Beverages and tobacco</i> atau minuman dan tembakau
Tex	9	<i>Textiles</i> atau tekstil
Woodpr	10	<i>Wood products</i> atau produk kayu

## Lampiran 2. Pengelompokan negara/wilayah basis data GTAP untuk analisis

Kode wilayah	No.	Deskripsi wilayah baru
ROW	1	<i>Rest of the World</i> atau negara-negara lainnya
Mideast	2	<i>Middle East</i> atau Timur Tengah dan negara-negara lainnya di wilayah ini
Oceania	3	<i>Australia-N. Zealand, Rest of Oceania</i> atau Australia, Selandia Baru dan negara-negara lainnya di wilayah ini
chn_hkg	4	<i>Cina and Hongkong</i> atau Tiongkok dan Hongkong
Jpn	5	<i>Japan</i> atau Jepang
Kor	6	<i>Korea</i> atau Korea Selatan
Idn	7	Indonesia
Mys	8	Malaysia
Phi	9	<i>Philippines</i> atau Filipina
Sgp	10	<i>Singapore</i> atau Singapura
Tha	11	Thailand
Vnm	12	Vietnam
Bgd	13	Bangladesh
Ind	14	India
Usa	15	<i>USA</i> atau AS
Bel	16	<i>Belgium</i> atau Belgia
Deu	17	<i>Germany</i> atau Jerman
Nld	18	<i>Netherlands</i> atau Belanda
Esp	19	<i>Spain</i> atau Spanyol
sov_un	20	<i>Soviet Union</i> atau Uni Soviet dan negara-negara lainnya di wilayah ini